

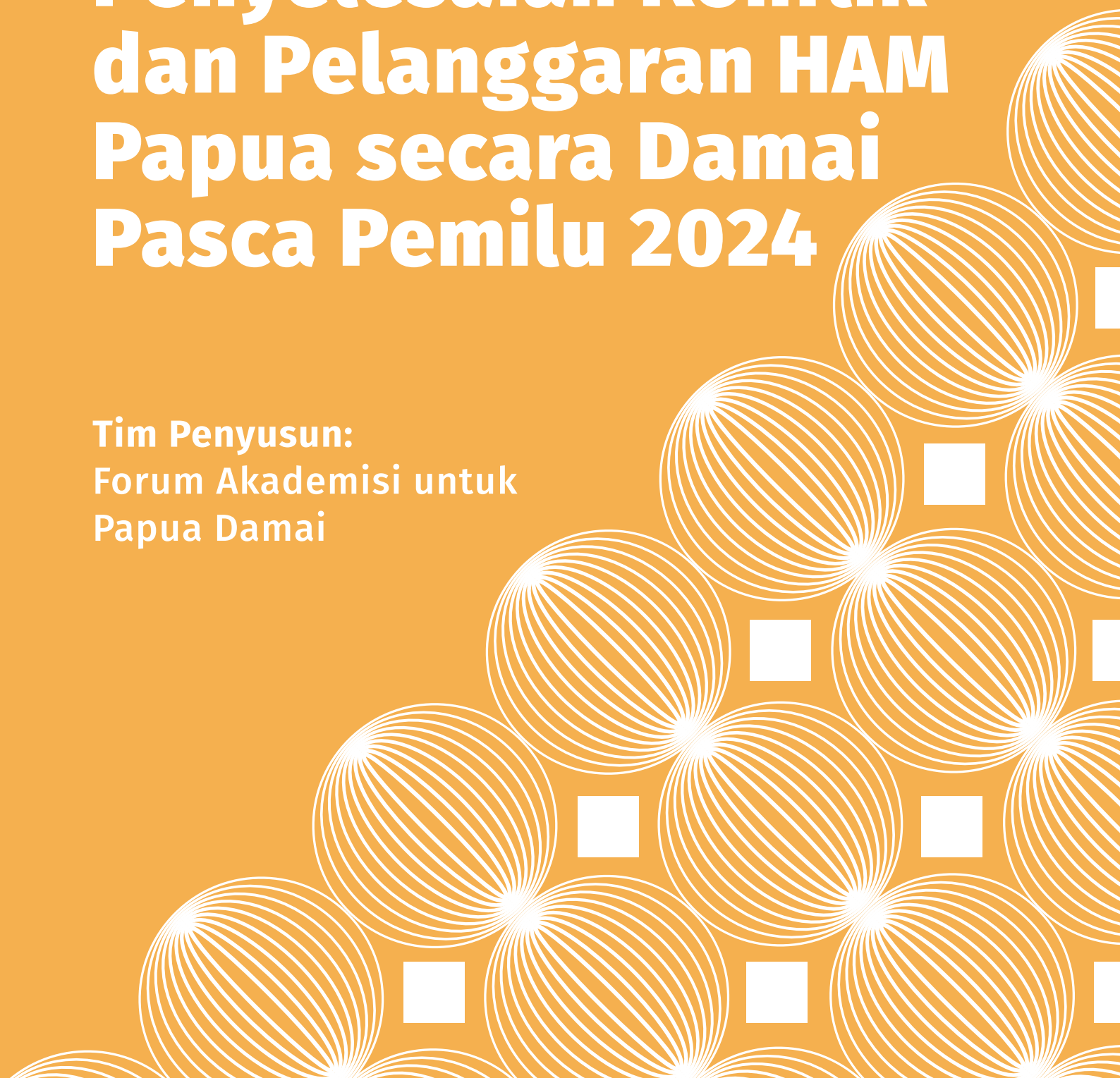
ALTERNATIVE POLICY

Jakarta, Januari 2024



Menakar Peluang Penyelesaian Konflik dan Pelanggaran HAM Papua secara Damai Pasca Pemilu 2024

**Tim Penyusun:
Forum Akademisi untuk
Papua Damai**



ALTERNATIVE POLICY

Menakar Peluang Penyelesaian Konflik dan Pelanggaran HAM Papua secara Damai Pasca Pemilu 2024

**Tim Penyusun:
Forum Akademisi untuk Papua Damai**

Jakarta, Januari 2024

Alternative Policy

IMPARSIAL, Yayasan TIFA, PACEDEPES, Forum Akademisi untuk Papua Damai

Deskripsi

Policy Review menyajikan kajian orisinal tentang kebijakan sosial, politik, hukum dan keamanan yang mendesak bagi situasi demokrasi di Indonesia, khususnya pada isu Hak Asasi Manusia, Reformasi Sektor Keamanan, Pembela HAM, Penghapusan Hukuman Mati, Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Penyiksaan oleh Aparat, Resolusi Konflik Papua, Ektremisme Kekerasan dan Terorisme. Penulisan ini ditujukan kepada pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, akademisi, jurnalis, dan masyarakat umum. Publikasi dari seri kajian ini memberikan wawasan dan perspektif kebijakan yang baru berdasarkan situasi, konteks, dan kerja-kerja di lapangan.

Catatan Penerbitan Tulisan

Pengajuan publikasi tulisan dapat dilakukan dengan mengirimkan kerangka penulisan dan naskah lengkap. Untuk informasi lebih lanjut tentang Seri Alternative Policy, silakan hubungi Penerbit.

Tim Penyusun

Forum Akademisi untuk Papua Damai

Desain Sampul dan Tata Letak: Fikri Hemas Pratama

PENERBIT

IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor

Jl. Tebet Dalam IV J, No. 5B, Jakarta 12810

Telp: (021) 8290-351

Fax: (021) 8541-821

E-mail: (021) 8541-821

Web: www.imparsial.org

DAFTAR ISI

01	 	KONDISI OBJEKTIF PAPUA SAAT INI	1
02	 	VISI-MISI CAPRES TERKAIT PAPUA DAN HAM	2
03	 	INISIATIF PENYELESAIAN KONFLIK PAPUA	3
04	 	MEMBANGUN GERAKAN DAN KOMITMEN MENYEMAI PAPUA DAMAI	5

KATA PENGANTAR

Dalam Debat Capres pada 12 Desember 2023 lalu, isu penyelesaian konflik Papua masuk menjadi salah satu pertanyaan yang diajukan kepada tiga kandidat yang berkontestasi pada Pilpres 2024. Ketiga kandidat ditanya mengenai strategi penyelesaian masalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan konflik di Papua. Sayangnya, semua kandidat gagal memberikan jawaban secara komprehensif untuk menciptakan damai di Tanah Papua.

Sejatinya, sumber utama permasalahan konflik Papua telah banyak dikaji. Salah satunya adalah studi yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI (kini: Badan Riset Inovasi Nasional/BRIN) yang bertajuk *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future* (2009). Studi tersebut menguraikan empat sumber permasalahan Papua, yaitu stigmatisasi dan diskriminasi, pelanggaran HAM, kegagalan pembangunan, dan status serta sejarah politik.

Akan tetapi, pendekatan yang dipilih pemerintah seakan tidak ingin merespon akar masalah konflik Papua. Pendekatan keamanan (*security approach*) tetap dijadikan pilihan utama, disamping kebijakan pembangunan yang salah diagnosis dan dinilai tidak tepat sasaran. Akibatnya, pelanggaran HAM dan kekerasan bersenjata masih terjadi serta krisis kemanusiaan terutama kondisi pengungsi semakin memprihatinkan. Berbagai persoalan tersebut menjadikan upaya penyelesaian konflik Papua bertambah semakin kompleks.

Inisiatif mendorong jalan alternatif penyelesaian konflik Papua melalui dialog telah didorong berbagai kalangan Masyarakat sipil. Ide dan gagasan dialog Papua misalnya diusung Jaringan Damai Papua (JDP) dan Forum Akademisi Papua Damai (FAPD). Komnas HAM periode 2017-2022 menginisiasi proposal penerapan Jeda Kemanusiaan (*Humanitarian Pause*) guna memutus rantai kekerasan di Papua. Akan tetapi, upaya perdamaian tersebut seakan menemui jalan buntu.

Meskipun demikian, terlepas dari kebuntuan tersebut, inisiatif perdamaian dan dialog tetap harus dilakukan. Berbagai bentuk intervensi masih dapat didorong dan dilakukan kelompok masyarakat sipil ke depan.

Dalam konteks tersebut, Kertas Posisi ini disusun dengan tujuan untuk menelaah kembali situasi dan dinamika hambatan serta tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian Papua. Sekaligus, Kertas Posisi ini juga akan menyediakan proyeksi perdamaian Papua pasca Pemilu 2024. Keberadaan Kertas Posisi ini esensial untuk memberikan gambaran alternatif membangun perdamaian di Papua, mengingat Pemilu 2024 akan memberikan dampak bagi prospek penyelesaian Konflik Papua.

Kertas Posisi ini disusun berdasarkan kajian terhadap Visi-Misi setiap pasangan calon Presiden-Wakil Presiden, sesi debat antar calon Presiden yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Focus Group Discussion (FGD) dengan sejumlah akademisi yang tergabung dalam Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD) pada tanggal 7 November 2023 dan tanggal 20 Desember 2023. FGD tersebut bertujuan untuk menghimpun pandangan dan penilaian para akademisi terkait prospek penyelesaian konflik Papua di bawah pemerintahan hasil Pemilu 2024.

01

Kondisi Objektif Papua Saat ini

Kondisi Papua praktis mengalami stagnasi. Konflik kekerasan yang menimbulkan korban warga sipil terus meningkat. Diskriminasi rasial, kegagalan pendekatan kesejahteraan hingga pelanggaran HAM adalah hal yang masih umum terjadi. Politik dan kebijakan pembangunan yang dilakukan di Papua masih bersifat *top-down* dan Jakarta sentris. Padahal, sejak Papua diintegrasikan ke dalam Indonesia, persoalan utama dari Papua adalah masalah kepercayaan (*trust*) terhadap Jakarta.

Menahunnya kekerasan di Papua telah mengakibatkan adanya kekecewaan yang turun temurun. Salah satu wujudnya adalah lahirnya generasi kebencian di Papua. Generasi ini kebanyakan adalah kaum muda yang memiliki dendam menahun akibat rantai kekerasan dan eksploitasi yang berlangsung di Papua. Tingginya kebencian tersebut memiliki korelasi dengan terus meningkatnya serangan terhadap pos ataupun patroli yang dilakukan militer atau polisi. Penguasaan terhadap medan tempur tentu saja sedikit banyak memberikan perlawanan signifikan bagi aparat keamanan.

Belum lagi, stigmatisasi dan alienasi terhadap Papua seakan dikampanyekan dalam berbagai ruang. Fenomena keterbatasan akses tempat tinggal bagi Orang Asli Papua (OAP) yang bermukim

di luar provinsi kerap terjadi. Seperti di Yogyakarta misalnya, beberapa kasus OAP kesulitan mencari kos bermunculan. Selain itu, anggapan bahwa Papua adalah 'wilayah terbelakang' atau 'jauh' tetap langgeng. Tidak heran jika masih ada yang mampu berkelakar ataupun bernada ancaman untuk mengirimkan mereka yang melakukan kesalahan di Jakarta pindah tugas di Papua.

Belum lagi, kekhawatiran terjadinya depopulasi OAP akibat kebijakan politik pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) juga ikut merebak. Seiring dengan bertambahnya DOB, dugaan mobilisasi masuknya pendatang ikut meningkat. Kompleksitas terjadi dengan adanya rencana peningkatan jumlah markas Polri dan TNI di wilayah DOB.

Sementara itu, narasi perdamaian nyaris tidak terdengar gaungnya dalam ruang publik. Atribusi keamanan dan pembangunan lebih dominan muncul dibandingkan dengan perdamaian atau damai. Pun, perdebatan antara OPM dan pemerintah di dunia maya tidak menyinggung perihal keinginan membangun perdamaian. Narasi perdamaian juga tidak kuat muncul dalam pemberitaan media. Padahal, sekalipun di era digital, media tetap perlu dilibatkan dalam melipatgandakan upaya perdamaian.

02

Visi-Misi Capres terkait Papua dan HAM

Isu Papua dan HAM adalah salah satu topik yang ikut digarisbawahi dalam dokumen visi-misi Capres-Cawapres. Tapi jika ditelaah lebih mendalam, maka dapat dilihat bahwa perhatian terhadap Papua hanya diberikan oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak memberi atensi pada isu Papua. Anies-Muhaimin memberikan segmen khusus terkait Papua dalam visi misinya. Sedangkan Ganjar-Mahfud memberi penekanan pada pemajuan ekonomi-sosial di Papua guna menutup *gap* pembangunan. Terkait isu HAM, pasangan Ganjar-Mahfud mengelaborasi lebih detail ketimbang Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran.

Tidak hanya menjadikan norma HAM sebagai standar yang harus dipatuhi, Ganjar-Mahfud juga menjanjikan penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.

Dalam Debat Capres 12 Desember 2023, cara pandang ketiga capres terkait penyelesaian konflik dan HAM di Papua memiliki perbedaan. Anies menitikberatkan pada ketidakadilan dan mencegah keberulangan. Sedangkan Prabowo menggambarkan Papua sebagai separatisme, adanya pengaruh kekuatan

asing dan disintegrasi. Oleh karena itu, menurutnya masyarakat Papua harus dilindungi dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Akan tetapi, tidak banyak elaborasi ide dan rencana program yang ditawarkan para capres dalam konteks Papua. Tidak ada penjelasan lanjutan bagaimana format maupun dialog akan dieksekusi. Atau, strategi jitu apa yang akan diambil guna mencegah keberulangan ketidakadilan di Papua juga tidak ada elaborasi. Pun, misalnya, program menjaga stabilitas politik dan keamanan akan diimplementasikan, apakah ini artinya aparat keamanan akan terus diperbanyak? Publik tidak mendapat jawaban memuaskan perihal pertanyaan terkait penyelesaian Konflik Papua dan HAM ini.

03

Inisiatif Penyelesaian Konflik Papua

Banyak institusi telah mencoba mencari format dan usulan penyelesaian konflik di Papua. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), dalam sebuah kajiannya, menyebutkan konflik dan eskalasi kekerasan di Papua tidak akan berkurang apabila pendekatan yang dipakai negara hanyalah konvensional dan berpusat pada isu ekonomi, kesejahteraan dan pembangunan. Diyakini, semakin tinggi perspektif ekonomi digunakan maka semakin tinggi eskalasi konflik di Papua. Pemerintah sendiri tidak satu suara perihal opsi pendekatan yang semestinya digunakan di Papua. Setidaknya, ada tiga pendapat yang mengerucut. Kelompok pertama adalah mereka yang hanya meyakini penyelesaian konflik Papua melalui pendekatan keamanan dan operasi militer. Selanjutnya, mereka yang mengedepankan kombinasi pendekatan keamanan dan ekonomi. Para birokrat dan ekonom berada dalam barisan pendapat kedua. Dan kelompok ketiga adalah yang mendorong pendekatan dialog dan nirkekerasan sebagai solusi penyelesaian konflik Papua. Umumnya, kelompok ini diisi oleh akademisi yang memiliki pemahaman terkait Papua. Akan tetapi, sejauh ini, pemerintah lebih cenderung menjalankan pendapat kedua: pendekatan keamanan dan ekonomi sebagai solusi penyelesaian Papua. Sementara ide dialog tidak mendapat perhatian memadai.

Upaya menurunkan eskalasi kekerasan melalui proposal Jeda Kemanusiaan sempat didorong Komnas HAM pada tahun 2022. Langkah ini sendiri diyakini didukung Panglima TNI yakni Marsekal Hadi Tjahjanto dan penggantinya, Jenderal Andika Perkasa. Kedua petinggi militer ini meyakini pendekatan militer tidak akan menyelesaikan masalah. Pemerintah, melalui Menko Polhukam Mahfud MD, juga ikut merespon positif dengan memberikan jaminan imunitas bagi delegasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang ikut serta dalam pembahasan. Jika ditelusuri lebih jauh, ide Jeda Kemanusiaan disebutkan muncul pertama kali dari pihak ULMWP. Walaupun, dua elit dalam kelompok ini sendiri tidak satu suara, Manashe Tabuni memilih untuk berunding, sementara Jeffrey Bomanak tidak setuju dengan opsi perundingan. Meskipun demikian, Komnas HAM menyambut baik ide ini dan menyampaikan pada pemerintah melalui Menko Polhukam. Selain itu, Komnas HAM juga melakukan peninjauan dengan sejumlah elemen seperti pihak gereja Papua, LSM, Majelis Rakyat Papua (MRP) hingga Uni Eropa.

Dengan menggunakan perspektif kemanusiaan, ide Jeda Kemanusiaan ini berfokus pada tiga isu. Pertama, penghentian kekerasan di Papua. Dengan adanya penghentian kekerasan maka

bantuan kemanusiaan dapat diberikan pada wilayah yang terdampak konflik. Terkait lokasi penghentian kekerasan kelak akan diatur Badan bersama yang berisi perwakilan dari para pihak bertikai. Kedua, penanganan pengungsi. Dalam hal ini, pengungsi yang ditangani difokuskan pada Kabupaten Maybrat. Ketiga, pembebasan tahanan politik Papua. Proposal Jeda Kemanusiaan yang digagas sejatinya bukanlah dialog politik damai, mengingat hal ini merupakan domain penuh pemerintah dan kelompok OPM. Dengan kata lain, Jeda Kemanusiaan hanyalah jembatan untuk membuka pintu dialog politik, mengingat dialog hanya dapat terselenggara ketika kondisi kontak tembak mereda.

Kesepakatan Jeda Kemanusiaan sempat ditandatangani Ketua Komnas HAM periode 2017-22, Ahmad Taufan Damanik. Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan di pengujung masa jabatan. Selain itu, dokumen ini juga ditandatangani perwakilan ULMWP, MRP dan Dewan Gereja Papua serta sejumlah *observer*. Akan tetapi, kesepakatan tersebut tidak berlanjut setelah adanya evaluasi dari kepemimpinan Komnas HAM periode 2022-27. Pembatalan sepihak oleh Komnas HAM ini pun mengundang reaksi beragam, terutama dari sejumlah tokoh dan pemerhati Papua.

04

Membangun Gerakan dan Komitmen Menyemai Papua Damai

Setidaknya ada dua alasan yang menjadikan dialog penyelesaian konflik Papua menjadi urgen dilaksanakan. Dengan adanya dialog maka penanganan pengungsi dan penanganan situasi krisis seperti pembebasan sandera dapat dilakukan lebih optimal. Sebab, dengan adanya dialog maka gencatan senjata di Papua wajib dilakukan. Di sisi lain, peta jalan juga harus disiapkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dialog damai. Beberapa hal yang harus mendapat atensi dalam peta jalan ini, antara lain penataan kebijakan dan politik untuk Papua yang tidak Jakarta sentris, pemajuan profesionalisme TNI/Polri, perbaikan regulasi dan norma yang mengatur tentang aparat keamanan hingga peningkatan kesadaran bersama terkait konflik Papua.

Tidak berlanjutnya proposal Jeda Kemanusiaan tentu saja patut untuk mendapat perhatian dan evaluasi. Belajar dari pengalaman Aceh, Jeda Kemanusiaan terkadang merupakan hasil dari meja perundingan. Mengingat hingga kini perundingan damai terkait Papua belum pernah terlaksana maka dibutuhkan adanya pendekatan dan strategi spesifik untuk mendorong para pihak mau ke meja perundingan.

Beberapa sektor membutuhkan intervensi agar agenda penyelesaian damai di Papua dapat berjalan. Mulai dari politik dan

kebijakan yang memungkinkan penguatan partisipasi aktor lokal Papua, kapabilitas dan komitmen birokrasi terutama lokal yang harus ditingkatkan, sinkronisasi regulasi dan program hingga koordinasi serta komunikasi antar lembaga.

Intervensi ini dapat berjalan jika konsolidasi masyarakat sipil untuk Papua Damai terjadi. Setidaknya ada tiga bentuk konsolidasi yang patut dipertimbangkan. Pertama, konsolidasi koalisi LSM dan Jaringan Damai Papua di Jayapura untuk membangun kerangka komprehensif perdamaian. Kedua, konsolidasi masyarakat sipil di Jakarta dengan membentuk komunitas epistemik yang mendorong dialog Jakarta-Papua. Komunitas ini harus mampu menjangkau masyarakat sipil lebih luas, politisi dan aparat keamanan. Kajian yang telah dilakukan Forum Akademisi untuk Papua Damai misalnya ditranslasi menjadi bahasa advokasi dan strategi gerakan. Ketiga, mendorong resolusi konflik yang dilakukan aktor negara seperti Lemhannas.

Perkembangan gerakan perdamaian di Papua juga patut untuk selalu dicermati. Langkah ini penting karena dinamika yang terjadi di dalam generasi muda di Papua dapat ikut berkontribusi menentukan arah perdamaian di Papua. Generasi muda Papua terkini jelas memiliki karakter khas yakni terdidik dengan adanya dominasi

lulusan pendidikan dari Jawa dan Sulawesi. Selain itu, gerakan perempuan seperti gerakan perempuan adat dan aktivis perempuan menarik untuk dicermati.

Meskipun demikian, faktor politik yakni kepemimpinan nasional tetap menjadi penting dalam mempengaruhi penyelesaian Papua. Di era Presiden Joko Widodo, sejatinya pernah ada harapan besar perdamaian Papua dapat diwujudkan. Oleh karena itu, pemerintahan baru kelak akan menentukan apakah ide penyelesaian konflik Papua akan menggunakan pendekatan kekerasan atau non kekerasan. Keberadaan kantor kepresidenan untuk proses perdamaian Papua menjadi salah satu opsi krusial untuk dibentuk pasca pemilu 2024.

Dukungan publik yang solid dalam mendorong resolusi konflik di Papua juga dibutuhkan. Sejauh ini, isu Papua masih menjadi minoritas dalam ruang percakapan publik. Dengan kata lain, membangun kesadaran publik terutama *Gen-Z* perihal konflik Papua menjadi salah satu kunci lain yang juga harus diperkuat. Kalangan muda yang disasar tentu saja tidak hanya yang berada di dalam Papua, melainkan juga di luar Papua. Hal ini menjadi penting mengingat narasi media di era Jokowi adalah seakan-akan Papua tidak ada masalah.

Profil IMPARSIAL (*the Indonesian Human Rights Monitor*)

Imparsial didirikan oleh 18 orang pekerja hak-hak asasi manusia Indonesia, antara lain: T. Mulya Lubis, Karlina Leksono, M.M. Billah, Wardah Hafidz, Hendaradi, Nursyahbani Katjasungkana, [Alm.] Ade Rostina Sitompul, Robertus Robet, Binny Buchory, Kamala Chandrakirana, [Alm.] H.S. Dillon, [Alm.] Munir, Rachland Nashidik, Rusdi Marpaung, Otto Syamsuddin Ishak, Nezar Patria, Amiruddin, dan Poengky Indarti. Para pendiri berbagi *concern* yang sama: kekuasaan negara dengan kecenderungan praktik-praktik represifnya menunjukkan kecenderungan menguat di Indonesia saat ini. Tepat di seberangnya, lembaga-lembaga masyarakat yang bekerja dalam bidang promosi dan perlindungan hak-hak asasi manusia justru menunjukkan kecenderungan melemah.

Imparsial diambil dari kata *impartiality*: pandangan yang memuliakan kesetaraan hak setiap individu dalam keberagaman latarnya terhadap keadilan, dengan perhatian khusus terhadap mereka yang kurang beruntung (*the less fortunate*). Kami menerjemahkan *impartiality* sebagai mandat untuk membela setiap korban pelanggaran hak-hak asasi manusia tanpa membedakan asal-usul sosialnya, jenis kelamin, etnisitas atau ras, maupun keyakinan politik dan agamanya.

Visi Imparsial adalah menjadi wadah bagi masyarakat sipil Indonesia dalam mempromosikan *civil liberties*, memperjuangkan *fundamental freedom*, melawan diskriminasi, mengupayakan keadilan bagi para korban dan menegakkan pertanggungjawaban. Sedangkan Misi Imparsial adalah: *pertama*, memonitor dan menyelidiki pelanggaran hak-hak asasi manusia, mengumumkannya kepada publik, memaksa pelakunya bertanggungjawab, dan menuntut pemegang kekuasaan negara memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak warga serta mengakhiri praktik kekuasaan yang jahat.

Kedua, menggalang solidaritas di antara sesama warga dan menghimpun sokongan internasional demi mendorong pemegang kekuasaan negara tunduk pada hukum internasional hak-hak asasi manusia.

Ketiga, meneliti keadaan-keadaan sosial yang dibutuhkan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia dan merekomendasikan perubahan-perubahan dalam kebijakan negara serta mengawasi implementasinya.



**Forum Akademisi
untuk Papua Damai**